

RINGKASAN

Herman Peran Dan Kewenangan Polres Aceh Utara Dalam Penegakan
Saputra Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Aceh
247410101007 Utara

(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H dan Prof. Dr. Faisal, S.Ag S.H., M.Hum)

Rokok ilegal merupakan produk yang tidak memiliki jaminan mutu karena proses produksinya tidak melewati pengawasan otoritas kesehatan maupun standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Rokok Ilegal dilarang beredar di Negera Indonesia. Dasar hukum larangan terhadap peredaran rokok ilegal diatur dalam Pasal 150 dan Pasal 437 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, namun kenyataannya rokok ilegal beredar di Kabupaten Aceh Utara. Polres Aceh Utara memiliki peran dan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, dan menganalisis kendala serta upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik penelitian lapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Polres Aceh Utara melaksanakan peran Pre-emptif, Preventif, dan Represif (penegakan hukum) sebagai kewenangan mandiri dalam menindak tindak pidana rokok ilegal yang melanggar Pasal 150 dan Pasal 437 Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan yang melanggar Pasal 54 Undang-Undang Cukai, kewenangan penuh berada pada Bea Cukai Lhokseumawe, dan Polres Aceh Utara berfungsi sebagai pendukung dalam aspek Koordinasi dan Pengawasan (Korwas). Polres Aceh Utara menghadapi kendala keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum dan banyaknya jalan pintas yang harus diawasi dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal. Untuk mengatasinya, kepolisian menerapkan strategi penebalan personel di titik rawan (*hotspot mapping*) pada jam-jam krusial serta mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak intelijen guna membangun kemitraan informasi dengan masyarakat lokal.

Disarankan perluasan kewenangan penyidikan bagi Polres Aceh Utara terhadap pelanggaran Undang-Undang Cukai guna menysasar potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari sindikat rokok ilegal berkapasitas besar. Disarankan Untuk mengatasi keterbatasan anggota Polres Aceh Utara direkomendasikan pembentukan Satgas lintas sektoral yang melibatkan unsur Reskrim, Satpol PP, dan Bea Cukai.

SUMMARY

Herman *The Role and Authority of the North Aceh Police in Law*
Saputra *Enforcement Against the Circulation of Illegal Cigarettes in*
247410101007 *North Aceh Regency*

(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H and Prof. Dr. Faisal, S.Ag S.H., M.Hum)

Illegal cigarettes are products that do not have quality assurance because their production process does not pass the supervision of health authorities or technical standards set by the government. Illegal cigarettes are prohibited from circulating in Indonesia. The legal basis for the prohibition on the circulation of illegal cigarettes is regulated in Article 150 and Article 437 of the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 54 and Article 56 of the Republic of Indonesia Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, but in reality illegal cigarettes are circulating in North Aceh Regency. The North Aceh Police have a role and authority in enforcing the law against the circulation of illegal cigarettes in North Aceh Regency.

The purpose of this thesis research is to analyze the role and authority of the North Aceh Police in tackling the circulation of illegal cigarettes in North Aceh Regency, and to analyze the obstacles and efforts made by the North Aceh Police in dealing with the obstacles in carrying out their role and authority to handle cases of circulation of illegal cigarettes in North Aceh Regency..

The research method used is empirical juridical with a case approach. The data collection technique used in this thesis is field research. Data analysis in writing this thesis is carried out in 4 (four) stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The North Aceh Police carry out pre-emptive, preventive, and repressive (law enforcement) roles as an independent authority in prosecuting illegal cigarette crimes that violate Article 150 and Article 437 of the Health Law. Meanwhile, for those who violate Article 54 of the Excise Law, full authority rests with Lhokseumawe Customs, and the North Aceh Police function as a supporter in the Coordination and Supervision (Korwas) aspect. The North Aceh Police face the constraint of limited personnel that is not commensurate with the vastness of the jurisdiction and the many shortcuts that must be monitored in tackling the circulation of illegal cigarettes. To overcome this, the police implement a strategy of thickening personnel in vulnerable points (hotspot mapping) at crucial hours and optimizing the role of Bhabinkamtibmas as the spearhead of intelligence to build information partnerships with the local community.

It is recommended that the North Aceh Police expand their investigative authority regarding violations of the Excise Law to target potential money laundering (TPPU) from large-scale illegal cigarette syndicates. To address the limited number of personnel at the North Aceh Police, it is recommended that a cross-sectoral task force be formed involving elements of the Criminal Investigation Unit, Public Order Agency (Satpol PP), and Customs and Excise.